

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur Buku :

- Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta : Liberty), 1989.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2009.
- Asmi, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan No. 1/1974*, (Jakarta : PT. Dian Rakyat), 1986.
- Gautama, Sudargo (Gouw Giok Siong), *Hukum Antar Golongan*, (Jakarta : Ichtiar Baru-Vanhouve, cetakan kelima), 1980.
- Gautama, Sudargo, *Segi Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti (Cetakan Ke IV), 1996.
- Hazarin, *Tinjauan Mengenai Undang Undang Perkawinan Nomor: 1-1974*, (Jakarta : Tintamas), 1975.
- Joeniarto, *Negara Hukum*, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Universitas Gajah Mada), 1981.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka), 1992.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), 1989.
- Kurnia, Titon Slamet, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Lubis, Todung Mulya, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), 2005.
- Malik, Nelly Adam, *Pembahasan Umum DPR. Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta, 17-18 September 1973.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, (Bandung : PT. Refika Aditama), 2009.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, (Jakarta : The Habibie Center Cetakan I), 2002.
- Naim, Sahibi, *Kerukunan Antara Umat Beragama*, (Jakarta : Gunung Agung), 1983.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung : Mandar Maju), 2012.

- Nurcholish, Ahmad & Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama : Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2005.
- O, Piet Go dan Suharto, *Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja*, (Malang : Dioma (Anggota IKAPI), 1987.
- Pamudji, *Pembahasan Pembahasan Umum DPR. Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta, 17-18 September 1973.
- Perdebatan seputar sidang-sidang BPUPKI dalam “Risalah Sidang BPUPKI” terbitan Sekneg tahun 1997.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, (Jakarta : Sumur Bandung, cetakan ke-7), 1981.
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 2012.
- R, Toebagus Hamzah, *Pembahasan Umum DPR. Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta, 17-18 September 1973.
- RUU tentang Perkawinan 1973, Keterangan Pemerintah, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Jakarta, 30 Agustus 1973.
- Rusjidi, H.M, *Harian Nusantara. Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan*, Jakarta, 18 Agustus 1973.
- Rusli dan R.Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung : Shantika Dharma), 1984.
- Sardjono, R, Berbagai-bagai Masalah Hukum dalam Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Paper). Diedarkan dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Tri Sakti, Jakarta.
- Sekartadji, Kartini, “Implikasi Pembentukan International Criminal Court (ICC) Kedalam Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Orasi Ilmiah disampaikan dalam Dies Natalis Ke-46 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Soekanto, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press), 1986.
- Soekanto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press), 1981.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Sosial*, (Jakarta : PT. elton Putra), 1991.
- Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*, (Bandung : Mandar Maju), 2002.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta : PT.Gramedia), 1987.

Suwondo,N,*Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*,(Jakarta : Ghalia Indonesia),1981

Trisnaningsih, Mudiarti, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia “The Relevance Of Certainty Of Law Regulating Inter-Religious Marriages In Indonesia”*, (Bandung : CV.Utomo), 2007.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hak-Hak Asasi Manusia : Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik Pada Masa Masa Awal Perkembangannya Dalam Toleransi Dalam Keragaman: Visi Untuk Abad 21, Kumpulan Tulisan Tentang Hak Asasi Manusia*, Surabaya : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2003

#### **Peraturan Perundang Undangan :**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 382/PDT/1986/PN.JKTPST

Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 1400K/Pdt/1986 tentang Permohonan Kasasi Andy Vonny Gani P dalam kasus perkawinan beda agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Rancangan Undang Undang Perkawinan Tahun 1973

Rapat-rapat “Panitia Kerja”, Risalah-risalah Sidang Sidang DPR. Jakarta 6-22 Desember 1973.

Risalah Sidang 6692 Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 di Mahkamah Konstitusi, tanggal 4 September 2014.

Risalah Sidang 7033 Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 di Mahkamah Konstitusi, tanggal 17 September 2014

Risalah Sidang 7248 Perkara Nomor 68 PUU-XII 2014 di Mahkamah Konstitusi tanggal 4 Desember 2014.